

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sosial, terdapat berbagai kepentingan yang dapat mempengaruhi keadaan individu atau kelompok yang tinggal didalam suatu kehidupan masyarakat dimana setiap individu ataupun kelompok itu berada. Perbedaan dan persamaan kepentingan menjadikan suatu pendorong bagi munculnya sebuah konflik dalam kehidupan sosial masyarakat. (Elly M & Usman, 2013 : 53).

Ada kalanya individu atau kelompok dihadapkan pada suatu konflik baik konflik antar individu, antar kelompok atau bahkan individu dengan kelompok. Konflik dapat ditimbulkan oleh banyak unsur, misalnya saja perbedaan prinsip atau pola pikir, perbedaan kepentingan atau tujuan, keadaan sosial yang berlainan, perbedaan etnis, ideologi, dan pandangan satu sama lainnya. (Elly M & Usman, 2013 : 53). Semakin banyak orang/penduduk yang berkumpul disuatu tempat atau daerah, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya konflik dan juga pertentangan terhadap kepentingan yang dapat mempengaruhi keadaan sosial.

Menurut Nurgiyantoro (2005 : 124) konflik sosial merupakan konflik yang disebabkan oleh adanya kontak sosial antarmanusia, atau masalah-masalah yang muncul akibat adanya hubungan antar manusia. Konflik merupakan suatu proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. (Polaman, 2004 : 107) dalam (Nadia Chairunisa. “Analisis

Resolusi Konflik Lahan Studi Kasus : Konflik Lahan Antara PAUD Islam Mandiri Dengan Pembangunan RPTRA,” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2017) hal.

2. Oleh karena itu konflik sosial yang terjadi di masyarakat terbagi menjadi dua yakni konflik horizontal dan konflik vertikal, dimana konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara pemerintah dengan rakyat. Sedangkan konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi di kalangan masyarakat sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Artinya, konflik tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah.

Konflik horizontal dan konflik vertikal pada umumnya disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara kelompok masyarakat dengan masyarakat lain atau adanya penolakan atas kebijakan pemerintah. Perbedaan pendapat biasanya ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok dan tidak adanya alternatif pemecahan masalah sehingga konflik sosial di masyarakat tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang konflik sosial yang terjadi pada masyarakat Kampung Cisapi Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Konflik sosial yang terjadi dikarenakan adanya penolakan masyarakat kampung Cisapi terhadap pengkremasian korban Covid-19 yang dilakukan oleh satgas Covid-19 Kota Tasikmalaya yang bekerjasama dengan Yayasan Bakti sebagai lembaga Krematorium. Lembaga krematorium Yayasan Bakti tersebut merupakan salah satu tempat pengkremasian jenazah di Kota

Tasikmalaya yang didirikan pada tahun 2005. Sampai sekarang Lembaga Krematorium tersebut masih berfungsi dan pernah mengalami renovasi pada tahun 2020.

Keadaan berubah semenjak adanya pandemi Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia, yang pada saat itu kasus virus corona terus melonjak dan semakin banyaknya korban yang dinyatakan meninggal akibat virus corona terkhususnya di Kota Tasikmalaya. Sumber konflik bermula dari adanya jenazah korban *Covid-19* yang dibawa oleh petugas kesehatan ke kampung Cisapi untuk dikremasi dan dilakukan pemakaman lalu mendapatkan penolakan dari masyarakat karena dikhawatirkan dapat menyebarkan virus kepada lingkungan sekitar ataupun masyarakat kampung Cisapi secara langsung tanpa diketahui dan terlihat penyebarannya. Jenazah korban *Covid-19* tersebut merupakan jenazah satu dari empat orang yang berada di klaster Lembang dimana pasien tersebut dikonfirmasi positif melalui rapid diagnostic test (RDT) pada Sabtu 28 Maret 2020. Pasien tersebut sebelumnya dirawat di salah satu Rumah Sakit Swasta di Kota Tasikmalaya dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) dan terkonfirmasi positif *corona*. Kemudian setelah beberapa hari pasien tersebut meninggal dunia dan dilarikan ke Tamansari untuk dilakukan pemakaman, namun pada saat akan melakukan pemakaman pihak petugas kesehatan mendapat penolakan dari masyarakat Tamansari atas pemakaman jenazah korban *Covid-19*, yang pada akhirnya jenazah tersebut dilarikan ke Kampung Cisapi untuk dikremasi. Namun pihak petugas kesehatan bekerjasama dengan Yayasan Bakti pada akhirnya

menerima dan melakukan kremasi dan pemakaman jenazah korban *Covid-19* walaupun mendapat penolakan dari masyarakat sekitar.

Dari adanya aktifitas tersebut, masyarakat akhirnya melayangkan tuntutan kepada pihak Yayasan Bakti beserta pihak Kelurahan Gununggede untuk mendapatkan jaminan kesehatan terhadap masyarakat disekitar Kampung Cisapi Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Tasikmalaya, namun sampai saat ini tuntutan hak atas jaminan kesehatan tersebut masih belum diakomodasi dan difasilitasi oleh pihak Yayasan Bakti sebagai bentuk tuntutan dari masyarakat Cisapi yang juga merupakan tempat dimana pengkremasian jenazah itu berada.

Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kampung Cisapi merupakan bentuk dari kepentingan sosial yang memiliki unsur kesamaan keinginan, tujuan hidup, ideologi, dan pandangan satu sama lainnya, dimana kepentingan sosial tersebut dipengaruhi oleh faktor sosiokultural dan ideologi yang telah melekat pada masyarakat kampung Cisapi tersebut. Konflik yang terjadi pada masyarakat kampung Cisapi juga dipengaruhi oleh kemajemukan Horizontal-sosial dimana kemajemukan ditimbulkan dari adanya unsur-unsur sosiopolitik dalam kesetaraan yang didasarkan atas perbedaan etnis, kultur, agama, ras, dsb sehingga menimbulkan kepentingan-kepentingan dan pendapat yang berbeda.

Keterlibatan pemerintah setempat dalam hal ini Kelurahan Gununggede ataupun pihak lembaga pemerintah lainnya tentu mempunyai peran penting dalam mengatasi konflik yang terjadi didalam kelompok masyarakat tersebut sehingga apa yang menjadi tuntutan masyarakat terkait jaminan kesehatan bisa terakomodir dengan baik.

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Marnit Hutasoit (2018). Tujuan penelitiannya adalah untuk menggambarkan konflik agraria perebutan tanah antara petani di tiga desa, yaitu Desa Margamulya, Desa Wanasari dan Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan Perusahaan Sumber Air Mas Pratama. Konflik lahan di kecamatan Teluk jambe memiliki riwayat yang dapat diketahui setidaknya hingga masa colonial Belanda sampai masa reformasi. Data yang didapatkan dalam penelitian didapatkan melalui wawancara mendalam ke masyarakat, PT Sumber Air Mas Pratama, dan Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kronologi di lahan tiga desa yaitu Desa Wanasari, Wanakerta, dan Margamulya muncul saat PT Dasa Bagja terlibat dalam menyewakan lahan milik masyarakat. Sebelumnya lahan tersebut adalah partikelir yang telah didistribusi oleh pemerintah kepada masyarakat. Tiga tahun berlangsung kontrak ternyata terdapat pengalihan surat kepemilikan lahan oleh warga yang dibawa PT. Dasa Bagja Kepada Perusahaan lain. Hingga akhirnya jatuh kepada PT. Sumber Air Mas Pratama. Akan tetapi, pada tahun 2000 PT. Sumber Air Mas Pratama mulai mengajukan ke pengadilan untuk melakukan pembebasan lahan. Runtutan kisah tersebut berpuncak pada Juni 2014 lalu, Ratusan aparat kepolisian dan ribuan preman diturunkan untuk melakukan eksekusi lahan. Rakyat melawan, memblokade jalan masuk alat-alat berat, namun tindakan represif dilakukan aparat dan preman untuk mengusir warga. Masyarakat yang sedang berkonflik sebenarnya sudah mempunyai keinginan untuk

menyelesaikan permasalahan tanah ini dan sepakat dengan ganti rugi namun disisi lain ada sebagian masyarakat yang masih menolak soal ganti rugi dengan beranggapan bahwa ada yang ingin membeli tanah tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Pihak-pihak yang berkonflik bukan antara rakyat dan rakyat, tetapi rakyat melawan pengusaha atau rakyat melawan pemerintah.

Penelitian lain telah dilakukan Sendi Rustanandika (2018) dalam skripsinya yang berjudul "Konflik Politik di Balik Perebutan Aset Daerah Antara Kabupaten Tasikmalaya dan Tasikmalaya Pasca Pemekaran Daerah Tahun 2001'. Dalam hal ini, fokus penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang berfungsi menetapkan inklusi-eksklusi dalam menyaring informan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan model analisis interaktif menurut teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik perebutan aset daerah harus diselesaikan cara mediasi antara kedua pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan Tasikmalaya yang dihadiri oleh pihak ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar konflik ini tidak berlarut-larut. Dengan demikian, konflik kedua pemerintah tersebut cepat terselesaikan dan tidak adanya pemekaran daerah yang berujung konflik.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tidak hanya meneliti dan menganalisis bagaimana konflik sosial di Desa Cisapi tersebut, tetapi penelitian ini juga mencari tahu terhadap bentuk-bentuk konflik, kategori konflik, penyebab dan dampak yang terjadinya konflik serta solusi yang dilakukan oleh pihak

setempat dalam mengatasi konflik sosial kelompok masyarakat cisapi dalam aksi penolakan pengkremasian korban *Covid-19*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Pemerintah Menangani Permasalahan Konflik antara Masyarakat Cisapi dan Yayasan Bakti dalam Kremasi Korban Covid-19?

### **C. Pembatasan Masalah**

Supaya penelitian ini tetap pada fokus utama dan terarah sesuai dengan dasar pemikiran dan rumusan masalah, maka penulis membatasi penelitian pada konflik yang terjadi pada kelompok masyarakat cisapi dalam melakukan aksi penolakan pengkremasian korban *Covid-19*.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah dan pembatasan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konflik yang terjadi pada kelompok masyarakat Cisapi Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dalam melakukan aksi penolakan pengkremasian korban *Covid-19*. Sehingga dapat memberikan solusi dari konflik yang terjadi dan mencegah potensi konflik yang akan datang atau terjadi.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan memberikan referensi kepada semua pihak mengenai informasi konflik yang terjadi pada kelompok masyarakat cisapi dalam melakukan aksi penolakan pengkremasian korban *Covid-19*.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada akademisi, mahasiswa dan berbagai pihak serta berguna untuk mengembangkan pembahasan mengenai konflik yang terjadi pada kelompok masyarakat Cisapi dalam melakukan aksi penolakan pengkremasian korban *Covid-19* oleh satuan gugus tugas penanganan Covid-19 Tasikmalaya.
- b. Bagi pemerintah dalam kajian penelitian ini memberikan suatu perhatian terhadap masalah atau konflik yang terjadi di masyarakat untuk bagaimana pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan kewajiban dalam mengurus persoalan kehidupan masyarakat dapat memberikan sebuah kontribusi dan peran yang nyata dalam menyelesaikan setiap problematika yang terjadi melalui solusi-solusi yang konkrit agar tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang damai dan berjalan dengan baik serta masyarakat bisa menyikapi dan memahami dalam penanggulangan Covid-19.



- c. Mengetahui solusi dari dampak yang ditimbulkan untuk menjadi acuan apabila terjadi hal yang serupa.